



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)
TELEPON; FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN DATA TANPA REDAKSI

SURAT PERNYATAAN
PENERIMAAN DATA TANPA REDAKSI
NOMOR (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dalam rangka pelaksanaan SP2DK / Pemeriksaan Pajak terhadap:

Nama Wajib Pajak : (8)
NPWP : (9)
Masa/Tahun Pajak : (10)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah meminta dokumen/data yang di dalamnya memuat informasi pihak lain (Data Pihak Lain) yang bukan merupakan subjek pemeriksaan.
2. Permintaan data tersebut didasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut:
.....
..... (11)
3. Saya bersedia menerima dokumen tersebut tanpa dilakukan redaksi (penghitaman/penyamaran permanen).
4. Saya menyatakan bertanggung jawab secara hukum atas penerimaan dan penggunaan data tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
5. Saya menjamin bahwa data yang diterima akan digunakan semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan tugas pemeriksaan dan tidak akan disalahgunakan atau disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)
TELEPON; FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (12)

Tim Pemeriksa Pajak:

Anggota,

Anggota,

..... (13)

Ketua Tim,

..... (14)

Supervisor,

..... (15)

..... (16)

LAMPIRAN
PERATURAN KETUA UMUM
IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA
NOMOR: 01/PER-
KU/IWPI/II/2026 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA DAN
RAHASIA WAJIB PAJAK DALAM
PROSES SP2DK DAN
PEMERIKSAAN PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN
PENERIMAAN DATA TANPA REDAKSI

- Angka (1) : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana SP2DK atau Unit Pelaksana Pemeriksaan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Penerimaan Data Tanpa Redaksi.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (4) : Diisi dengan nama tim Pemeriksa Pajak.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor induk pegawai Pemeriksa Pajak.
- Angka (6) : Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak (supervisor, ketua tim, anggota tim, atau ketua dan/atau anggota tim).
- Angka (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menjadi objek SP2DK atau Pemeriksaan Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang menjadi objek SP2DK atau yang diperiksa.
- Angka (10) : Diisi dengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa.
Contoh:
1. Pemeriksaan dilakukan untuk masa pajak Januari s.d. Maret Tahun 2025, maka diisi:
Januari 2025 s.d. Maret 2025.
 2. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak 2025 dan tahun bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi:
Januari 2025 s.d Desember 2025.
 3. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak 2025, namun tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2026, maka diisi:
April 2025 s.d Maret 2026.
- Angka (11) : Diisi dengan dasar hukum tertulis yang menjadi landasan permintaan data tanpa redaksi.

- Angka (12) : Diisi dengan kota dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan Penerimaan Data Tanpa Redaksi.
- Angka (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan anggota tim yang melakukan Pemeriksaan (d disesuaikan dengan jumlah anggota tim Pemeriksa Pajak).
- Angka (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan anggota tim yang melakukan Pemeriksaan (d disesuaikan dengan jumlah anggota tim Pemeriksa Pajak).
- Angka (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim yang melakukan Pemeriksaan.
- Angka (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan supervisor yang melakukan Pemeriksaan.